

**PEMAHAMAN GURU TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Di SMK NEGERI
SE-KOTA YOGYAKARTA**

**TEACHER'S UNDERSTANDING ABOUT IMPLEMENTATION OF
CURRICULUM OF CIVIC EDUCATION at VOCATIONAL HIGH SCHOOL'S
IN YOGYAKARTA**

Nurlita Andari Putri dan Cholisin, M.Si

E-mail: *Nurlitaandariputri@yahoo.co.id*

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pemahaman guru tentang pelaksanaan kurikulum PPKn dari segi perubahan nama, tujuan, materi metode dan tanggapan guru tentang pelaksanaan kurikulum PPKn Di SMK Negeri Se-Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive*. Kriteria yang sesuai adalah guru S1 Prodi PPKn. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Data yang diperoleh dianalisis dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data yaitu membentuk tema, kategori, pola serta makna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta mengenai pelaksanaan kurikulum dari segi nama, tujuan, materi dan metode dari mata pelajaran PPKn. Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari tanggapan guru mata pelajaran PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: *Pemahaman Guru dan Pelaksanaan Kurikulum*

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the teacher's understanding about the implementation of curriculum of Civic Education in terms of change of name, purpose, material method and teacher response about the implementation of curriculum PPKn In Vocational High School Yogyakarta. The type of research used is descriptive with qualitative research approach. Determination of research subjects using the appropriate purposive criterion technique is the teacher S1 study program PPKn. Data collection techniques with interviews and documentation. Technique examination of data validity used with cross check data. The data obtained is analyzed by preparing and organizing the data that is forming theme, category, pattern and meaning. The results of this study describe the understanding of Vocational High School in Yogyakarta about the implementation of the curriculum in terms of names, objectives, materials and methods of PPKn subjects. In addition, this study shows the positive and negative impacts of teacher's responses on the subject matter of PPKn curriculum at Vocational High School in Yogyakarta.

Keywords: *Teacher's Understanding and Implementation of the Curriculum*

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan merupakan aspek terpenting dalam usaha pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk menilai mutu pendidikan di Indonesia dilihat dengan delapan kriteria, yaitu isi (kurikulum), proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelola pendidikan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan.

Guru yang memiliki kompetensi baik juga akan mampu mentransfer pengetahuannya kepada peserta didik dengan baik. Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik baik sebagai warga Negara (Cholisin, 2015:13). Dengan memahami substansi PKN yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) seorang guru harus mampu menguasai ketiga substansi PPKn tersebut agar mampu mengajarkan kepada peserta didik sebagai warga negara yang baik (Cholisin, 2015: 13).

Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan strategis dan penting dalam membentuk sifat dan sikap peserta didik dalam berperilaku keseharian, sehingga diharapkan setiap

individu mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlak baik. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menuntut peserta didik menunjukkan sikap yang baik, kritis, kreatif, dan bertanggungjawab.

Secara historis epistemologis dan pedagogis, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata pelajaran *Civics* atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah *Civics* tersebut secara formal tidak dijumpai dalam kurikulum tahun 1957 maupun dalam kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang didalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan (Udin, 2012:168).

Dalam kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah isinya

sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. (Depdikbud dalam Udin, 2012:169)

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran *Civics* atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikator telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler. Untuk saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu Kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan K 13. Terjadi perubahan nama yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang mana Kurikulum 13 ini pelajaran PPKn lebih mengajarkan pada sikap dengan pembelajaran menggunakan pendekatan 5 M atau pendekatan Saintifik.

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pemahaman guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta mengenai pelaksanaan kurikulum dari segi nama, tujuan, materi dan metode dari mata pelajaran PPKn. Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari tanggapan guru mata pelajaran PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman (*comphrehension*) juga sebagai daya usaha seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu untuk disadari atau diberi perhatian,

termasuk di dalam kemampuan untuk menyerap makna dari maksud yang terkandung, diterangkan dengan memaparkan fokus dari suatu penafsiran makna dalam sebuah kalimat atau perubahan data yang disediakan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Sudaryono, 2012:43).

Menurut Daryanto, guru menjadi bagian terpenting dalam tingkat dan fase yang dilalui siswa atau sasaran didik dalam mempelajari sesuatu, baik di dalam lingkungan sekolah sendiri maupun di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, keberadaan guru tidak akan pernah lepas dari kemajuan kualitas sistem pendidikan di Indonesia (Daryanto, 2013: 1). Peran guru juga harus mampu memberikan dorongan belajar kepada siswa, salah satunya dengan guru menggunakan cara pembelajaran yang menarik saat di kelas, sehingga siswa merasa senang dan tertarik dengan kegiatan pembelajaran (Muchlas, 2009: 146).

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. (Sarimaya, 2008: 17-22). Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pengembangan Keprofesionalitas Berkelanjutan merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.

Guru PPKn dituntut untuk meningkatkan daya cipta dan daya guna yang tercermin pada karakteristik

mata pelajaran PPKn yaitu strategis, luas dan kompleks. Hal ini sebagai akibat dari pendirian mata pelajaran PPKn yang memiliki misi sebagai pendidikan politik, demokrasi, pendidikan HAM, pendidikan karakter, bahkan sebagai pendidikan anti korupsi. Rancangan, tujuan, fungsi, mencerminkan gambaran tersebut. *Civic education* adalah cara belajar yang membangkitkan rasa ingin tahu dan kepercayaan (*trust*) terhadap kaidah-kaidah sosial yang mengatur interaksi seorang individu dalam masyarakat seperti mengatur peran serta dalam politik (Cholisin, 2015: 15).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan perkembangan dari kewarganegaraan yang lebih mengedepankan sudut pandang praktik kewarganegaraan. Maka dari itu disebut sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang menyiapkan dan membekali siswa tentang pemahaman menjadi warga negara (Wahab & Sapriya, 2011: 32).

PPKn secara teoretik, didesain sebagai pokok bahasan dalam pembelajaran yang berisikan komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling terpadu dalam konteks ide, nilai, gagasan, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. PPKn secara programatik, didesain sebagai pokok bahasan dalam pembelajaran yang mengutamakan pada isi yang membawa nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk bermacam tingkah laku yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga komponen utama dalam kompetensi yang perlu dipelajari dalam PPKn, yaitu *civic*

knowledge, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Muhibbin, 2016: 1).

PPKn bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran rasa berbangsa serta memiliki jiwa yang berciri demokrasi serta berbudi yang luhur (Noor Ms Bakry, 2011: 3). PPKn pada jenjang sekolah bertujuan untuk menyiapkan para peserta didik menjadi warga Negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk masyarakatnya menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), warga negara yang bercirikan adanya keberanian membela dan terdapatnya rasa loyalitas yang tinggi pada tanah airnya, bertoleransi kepada sesama, menganut agama yang diakui oleh negara dan memiliki sikap bercirikan demokrasi (Wahab & Sapriya, 2011: 311)

Standar Isi Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 64 Tahun 2013) mempertegas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 mengenai ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk setiap jenjang sejak SD/MI hingga SMA/MA dan SMK/MAK. Adapun cakupan materi mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Melihat karakteristik dan tujuan dari pembelajaran PPKn, maka metode pembelajaran PPKn yang membawa misi pendidikan yang demokratis, pembangunan karakter agar menjadi warga negara yang baik, tentunya agar terwujud itu semua diperlukan metode yang baik pula. Pembelajaran PPKn berbasis portofolio salah satunya. Pembelajaran PPKn berbasis portofolio

merupakan metode pembelajaran sebagai upaya untuk membentuk warga negara yang bercirikan demokrasi, yakni cara pembelajaran terhadap anak didik dengan membangun kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, serta membangun rasa tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong anak didik untuk ikut serta sebagai warga negara (*civic participation*) (Wahab, 2011: 346).

Kurikulum dalam sistem pendidikan sifatnya dinamis dengan senantiasa dilakukan perubahan dan pengembangan, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Berkaitan dengan itu, sejak wacana perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 digulirkan, banyak pendapat muncul dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Sebuah kurikulum yang sudah dikembangkan tidak akan memberikan arti bila tidak bisa diterapkan secara aktual di sekolah/madrasah dan di kelas (Setiawati, 2016: 70) Dalam Oemar Hamalik (2007: 13) ada enam fungsi kurikulum yaitu: fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi deferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik.

PPKn telah muncul dengan berbagai nama. Numan Somanteri dalam Sunarso (2016) mengemukakan bahwa istilah “*Civics* dan *Civics Education*” telah muncul masing-masing dengan nama: Pendidikan Kewarganegaraan (1957); *Civics* (1962); dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pendidikan Kewarganegaraan (1957) membahas materi tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedang *Civics* (1962) lebih banyak membahas Sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, Pidato-Pidato Politik Kenegaraan,

terutama yang diarahkan untuk “*nation and character building*” bangsa Indonesia, seperti pada waktu pelaksanaan pelajaran *Civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah *Declaration of Independent*. Pidato-Pidato Politik Kenegaraan ini dikemas dengan nama “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” (TUBAPI) yang berisi pidato-pidato politik kenegaraan mantan Presiden Soekarno ditambah dengan *Manifesto Politik* (Manipol) dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK). Pada masa pemerintahan Orde Baru bahan-bahan pelajaran yang bersifat *indoktrinasi* tersebut dibuang dan dihilangkan sama sekali melalui Kurikulum 1968 dengan melakukan perubahan-perubahan materi dan metode penyampaian. Adapun materi pelajaran atau kelompok mata pelajaran untuk Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila. Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa (Sunarso, 2009: 73).

Berdasarkan Ketetapan MPR 1978, kurikulum PPKn diganti dengan nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Ini merupakan hasil penggabungan mata pelajaran sejenis menjadi bidang studi. Bidang studi PMP merupakan bahan-bahan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkutan paut di antaranya mata pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi, dan Ekonomi. (Sunarso, 2009: 74-75).

Reformasi pendidikan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai titik temu kepentingan dua hal. Secara internal, perubahan politik melalui gerakan reformasi nasional telah mendorong pembaharuan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari gerakan reformasi pendidikan nasional secara keseluruhan. Pilihan reformasi pendidikan kewarganegaraan tidak semata-mata merubah paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan *subject matters* yang dominan aspek afektif, tetapi bergeser (berganti) kepada paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan kompetensi kewarganegaraan bagi para siswa meliputi aspek pengetahuan (materi kajian), aspek keterampilan/kecakapan dan aspek perilaku. (Samsuri, 2011: 278).

Pendidikan amat berperan dalam mendidik warganegara yang demokratis, yang menyiratkan dan mensyaratkan bahwa pendidikan itu sendiri haruslah demokratis dan dilakukan dengan cara-cara yang demokratis pula sebab pendidikan harus efektif yang didukung oleh faktor-faktor startegis lingkungan internal dan eksternal. (Sunarso, 2009: 76).

Sejak 1960-an sampai dewasa ini (era Reformasi), pengembangan PPKn lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan penguasa, ketimbang kepentingan warga negara. Kepentingan penguasa itu, terutama untuk mempertahankan keberadaannya. Oleh sebab itu PPKn lebih diorientasikan untuk indoktrinasi, hegemoni, legitimasi dan mobilisasi politik. Kondisi ini, mengakibatkan bobot keilmuan PPKn menjadi sangat lemah atau terabaikan. Akibat lain PPKn menjadi tidak mampu

mengembangkan sikap kritis warga negara terhadap penguasa/pemerintah dan juga tidak mampu untuk memberdayakan (*empowerment*) warga negara (Cholisin, 2000: 238).

Gelombang gerakan reformasi di Indonesia pada awal 1998 yang berujung pada mundurnya Pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 mei 1998, membuka peluang terjadinya reformasi dalam pendidikan kewarganegaraan, dan umumnya dalam kurikulum di sekolah-sekolah dasar hingga menengah. Reformasi pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dalam materi kajian, juga mengenai metode dan sistem penilaiannya. (Samsuri, 2004: 233).

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tujuh sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se-Kota Yogyakarta yaitu SMK Negeri 1 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Negeri 4 Yogyakarta, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK Negeri 6 Yogyakarta dan SMK Negeri 7 Yogyakarta.

Waktu Penelitian

Penelitian di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta telah dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yakni bulan April hingga Juli 2017.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Suharsimi Arikunto (1991: 25), menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu apabila bermaksud untuk mengetahui

keadaan sesuatu apa dan bagaimana, seberapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. (Creswell, 2010: 264).

Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014 : 54).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Herdiansyah (2013 : 31), wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) berjenis semi-terstruktur. Pertanyaan yang diajukan kepada terwawancara bersifat terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, sehingga jawaban yang diberikan oleh terwawancara

tidak dibatasi dan dapat lebih bebas mengemukakan pendapatnya sepanjang tidak keluar dari tema.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis, baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari dokumen tersebut dilakukan kajian isi, sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha memperoleh karakteristik pesan (Lexy Moleong, 2007: 163). . Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran PPKn di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik *cross check* data digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada obyek yang sama (Burhan Bungin, 2012: 95). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi, sehingga *cross check* dilakukan dengan mengecek data yang berasal dari wawancara antar subjek penelitian dengan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan mendeskripsikan data, mengklasifikasikan data, dan menafsirkan data. (Creswell, 2015: 251).

1. Mendeskripsikan Data

Peneliti membuat deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang peneliti dan dari perspektif yang ada dalam literatur. Deskripsi secara detail berarti bahwa penulis mendeskripsikan sesuatu dari yang terlihat. Detail atau perincian diberikan *in situ*, yaitu, dalam konteks lingkungan dari person, tempat, atau peristiwa yang sedang diteliti. (Creswell, 2015: 257).

Dalam tahap mendeskripsikan data peneliti menganalisis data dengan menggambarkan tujuh lokasi penelitian dan juga tujuh subjek penelitian di SMK Negeri 1 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Negeri 4 Yogyakarta, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK Negeri 6 Yogyakarta dan SMK Negeri 7 Yogyakarta.

2. Mengklasifikasikan Data

Tahap selanjutnya adalah tahap klasifikasi, yaitu memilah-milah teks atau informasi kualitatif, dan mencari kategori, tema, atau dimensi informasi. Tema dalam penelitian kualitatif (juga disebut kategori) adalah satuan informasi yang luas yang tersusun dari beberapa kode yang dikelompokkan untuk membentuk ide umum. Dari informasi atau data yang masih secara umum, direduksi menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola, dan menulisnya menjadi narasi akhir penulis. (Creswell, 2015: 259). Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menganalisis data menggunakan kategori dan tema. Peneliti mengklasifikasikan data dari tema tersebut berupa data dalam bentuk tabel.

3. Menafsirkan Data

Penafsiran dalam penelitian kualitatif adalah keluar dari kode dan tema menuju makna yang lebih luas dari data. Hal ini merupakan proses yang dimulai dengan pengembangan kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan disusul dengan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk memaknai data. Terdapat beberapa bentuk penafsiran, misalnya penafsiran berdasarkan prasangka, pandangan, dan intuisi. Penafsiran juga dilakukan pada gagasan atau ide ilmu pengetahuan sosial atau kombinasi dari pandangan personal yang kontras dengan gagasan atau ide ilmu pengetahuan sosial. Artinya, peneliti akan menghubungkan penafsirannya dengan literatur riset yang lebih luas yang dikembangkan oleh ilmuwan lain. (Creswell, 2015: 261).

Selain ketiga langkah tersebut, peneliti juga melakukan analisis data dengan pengambilan kesimpulan. Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis tersebut kemudian dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan dan diadakan pembuktian keotentikan data. Pengambilalihan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan tidak menyimpang mengenai Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil Penelitian menjadikan pola yaitu dari ketujuh sekolah tempat penelitian, yang menjadi masalah adalah perubahan nama PPKn menyebabkan sebagian besar guru mengalami kebingungan sehingga perubahan nama tersebut mempengaruhi pada materi yang diajarkan kepada peserta didik. Adapun makna penelitian menurut para subjek penelitian yaitu perubahan nama dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadikan guru sebagai pendidik mengalami kebingungan karena ketidakconsistenan pemerintahan dalam mengkaji kurikulum PPKn tingkat SMK.

2. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil Penelitian menjadikan pola yaitu dari ketujuh sekolah tempat penelitian, perubahan tujuan PPKn tetap mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional. Adapun makna penelitian menurut para subjek penelitian yaitu perubahan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa setiap mata pelajaran di sekolah secara umum mempunyai tujuan yang baik untuk pembelajaran. Namun, PPKn sendiri mempunyai tujuan yang lebih rinci yaitu mengajarkan peserta didik untuk dapat berperan aktif dalam kemajuan kehidupan bangsa dan negara.

3. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian menjadikan pola yaitu dari ketujuh sekolah tempat penelitian, perubahan materi PPKn yaitu kurikulum yang berlaku saat ini tidak bisa dipisahkan dari rezim yang berkuasa, banyak materi PPKn saat ini yang mengalami tumpang tindih atau materi yang berulang-ulang contohnya pada materi Hak Asasi Manusia yang diajarkan pada kelas 10, 11 dan 12. Materi PPKn yang terlalu luas dan global juga mempersulit guru dalam mengatur waktu mengajar, mengingat mengajar di jenjang SMK terbatas pada waktu jam praktikum peserta didik. Peserta didik juga lebih tertarik terhadap materi PPKn dengan menganalisis kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan di media massa atau berita terkini di masyarakat.

4. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Metode Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian menjadikan pola yaitu dari ketujuh sekolah tempat penelitian, perubahan metode PPKn tidak banyak terjadi, metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi maupun *problem solving*. Penerapan metode PPKn melihat situasi kelas terlebih dahulu karena tidak semua kelas dapat menerima pelajaran dengan metode yang sama pada kelas lain. Adapun makna penelitian menurut para subjek penelitian yaitu perubahan materi dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa sebagai guru harus berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak dipungkiri guru memiliki peranan yang besar dalam

pemahaman peserta didik khususnya terhadap mata pelajaran PPKn.

5. Tanggapan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Pelaksanaan Kurikulum PPKn di Sekolah

Hasil penelitian menjadikan pola yaitu dari ketujuh sekolah tempat penelitian, tanggapan guru terhadap pelaksanaan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bahwa kurikulum yang berjalan sesuai aturan pemerintah dan dapat diterapkan di suatu sekolah dengan baik juga berakibat positif dalam pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas. Sebaliknya pelaksanaan kurikulum yang tidak sesuai atau dikatakan buruk karena ketidakberhasilan pemerintah maupun guru dalam menerapkan kurikulum tersebut juga berdampak negatif dalam proses kegiatan belajar mengajar.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa persepsi guru mengenai pelaksanaan kurikulum PPKn dari segi perubahan nama dalam kurun waktu Orde Lama hingga Reformasi, tampak bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengalami kebingungan atas ketidakkonsistenan perubahan nama tersebut. Namun perubahan nama kurikulum Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurun waktu tersebut tidak terlalu banyak mengalami perubahan.

2. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa pemahaman guru mengenai pelaksanaan kurikulum PPKn dari segi tujuan ialah secara umum tujuan PPKn tidak banyak mengalami perubahan. Pengetahuan dan sikap menjadi prioritas dari tujuan tersebut. Tujuan secara khusus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu membekali peserta didik sesuai Pancasila dan mampu mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut sehingga mampu menjadi warga negara yang baik.

3. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum dari segi materi PPKn yaitu materi yang berubah-ubah sesuai perkembangan dari setiap kurikulum yang berlaku menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Namun perubahan dari setiap materi tersebut tidak begitu

berpengaruh, hanya saja materi saat ini begitu kompleks dan global.

4. Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Dari Segi Metode Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pemahaman guru mengenai pelaksanaan kurikulum PPKn dari segi metode pembelajaran PPKn adalah metode pembelajaran yang efektif yang dapat diterapkan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai banyak variasi. Ada beberapa metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang biasa diterapkan pendidik di sekolah yaitu Ceramah, *Discovery Learning*, *Role Playing*, maupun menggunakan *Power Point* (PPT). Namun tidak semua metode tersebut dapat diterapkan di semua kelas. Sebelum kegiatan belajar mengajar seorang pendidik juga memperhatikan kondisi dari setiap kelas. Ada kelas yang berkemampuan tinggi sehingga dapat dengan mudah menerima metode pembelajaran yang diberikan, begitu sebaliknya kelas dengan berkemampuan rendah, pendidik lebih banyak memilih menggunakan metode Ceramah.

5. Tanggapan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Pelaksanaan Kurikulum PPKn Di Sekolah

Hasil penelitian yang telah dilakukan di tujuh sekolah mengenai Pemahaman Guru Tentang

Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta menyatakan bahwa suatu kurikulum dapat berjalan dan dapat diterapkan dengan baik di sekolah, tentu nya tidak lepas dari seorang guru yang memegang peranan utama dalam proses kegiatan belajar. Ketujuh subjek penelitian mempunyai tanggapan mengenai kurikulum PPKn dari sisi baik dan buruk. Tanggapan dari sisi baik tentu nya akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan proses belajar mengajar. Alasan mengemukakan dari sisi baik tersebut ialah guru yang memiliki empat kompetensi yang dapat mentransfer ilmu pengetahuannya dengan baik kepada peserta didik tentu nya peserta didik juga dapat menerima materi dengan baik. Demikian itu yang menjadi tolak ukur dalam kurikulum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sebaliknya suatu kurikulum yang berjalan belum sesuai dengan aturan pemerintah juga membawa dampak yang negatif dalam kelangsungan proses belajar mengajar. Untuk itulah peran guru dalam menyampaikan materi juga akan mempengaruhi keberhasilan suatu kurikulum di sekolah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data pada hasil dan pembahasan, maka dibuatlah suatu kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pemahaman Guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta mengenai pelaksanaan kurikulum dari segi nama, tujuan, materi dan metode dari mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu:

- a. Segi perubahan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu tampak bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengalami kebingungan atas perubahan-perubahan nama tersebut sehingga perubahan nama tersebut mempengaruhi pada materi yang diajarkan kepada peserta didik. Perubahan nama dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menjadikan pemerintah harus lebih teliti dalam mengkaji kurikulum PPKn tingkat SMK. Perubahan nama mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dari masa orde lama, orde baru dan reformasi tidak banyak berpengaruh pada mata pelajaran PPKn itu sendiri karena hanya perubahan nama yang terjadi dan tidak menghilangkan kemanfaatan dari PPKn.
 - b. Segi tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu tujuan PPKn tetap mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional. Secara umum tujuan PPKn tidak banyak mengalami perubahan. Pengetahuan dan sikap menjadi prioritas dari tujuan tersebut. Tujuan secara khusus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu membekali peserta didik sesuai Pancasila dan mampu mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut sehingga mampu menjadi warga negara yang baik.
 - c. Segi materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu perubahan materi PPKn yaitu kurikulum yang berlaku saat ini tidak bisa dipisahkan dari rezim yang berkuasa, banyak materi PPKn saat ini yang mengalami tumpang tindih atau materi yang berulang-ulang contohnya pada materi Hak Asasi Manusia yang diajarkan pada kelas 10, 11 dan 12. Materi PPKn yang terlalu luas dan global juga mempersulit guru dalam mengatur waktu mengajar, mengingat mengajar di jenjang SMK terbatas pada waktu jam praktikum peserta didik. Peserta didik juga lebih tertarik terhadap materi PPKn dengan menganalisis kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan di media massa atau berita terkini di masyarakat.
 - d. Segi metode Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu perubahan metode PPKn tidak banyak terjadi, metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi maupun *problem solving*. Penerapan metode PPKn melihat situasi kelas terlebih dahulu karena tidak semua kelas dapat menerima pelajaran dengan metode yang sama pada kelas lain.
2. Tanggapan Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Negeri se-Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan kurikulum yang berlaku di Sekolah bahwa kurikulum yang berjalan sesuai aturan pemerintah dan dapat diterapkan di suatu sekolah dengan baik juga berakibat positif dalam pelaksanaan

proses pembelajaran di dalam kelas. Sebaliknya pelaksanaan kurikulum yang tidak sesuai atau dikatakan buruk karena ketidakberhasilan pemerintah maupun guru dalam menerapkan kurikulum tersebut juga berdampak negatif dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemahaman Guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta mengenai pelaksanaan kurikulum dari segi nama, tujuan, materi dan metode dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu:
 - a. Guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta mengalami kebingungan atas ketidakkonsistenan perubahan nama tersebut sehingga perubahan nama tersebut mempengaruhi pada materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi kurikulum pendidikan di Indonesia.
 - b. Guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta secara umum tidak banyak mengalami perubahan dalam hal tujuan PPKn. Tujuan PPKn harus menjadikan warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta dapat berpartisipasi aktif dalam membangun negara agar Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan juga menjadi warga negara yang cerdas dan mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara.
 - c. Guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa materi yang berubah-ubah sesuai perkembangan dari setiap kurikulum

yang berlaku menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi. Pemerintah seharusnya bisa lebih memperhatikan perkembangan materi PPKn di SMK, dan juga mengkaji kembali isi materi PPKn dengan jam mengajar di SMK.

- d. Guru SMK Negeri se-Kota Yogyakarta mempunyai metode pembelajaran yang efektif dan juga bervariasi. Penerapan metode PPKn melihat situasi kelas terlebih dahulu karena tidak semua kelas dapat menerima pelajaran dengan metode yang sama pada kelas lain.
2. Tanggapan Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Negeri se-Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan kurikulum yang berlaku di Sekolah yaitu harus ada sinergi antara guru, sekolah, dan juga kurikulum yang berlaku di sekolah. Adanya keberhasilan kurikulum juga ditinjau dari wawasan guru dalam hal penguasaan materi mata pelajaran PPKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cholisin. 2000. *Modul 1-9: IKN-PKN*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Cholisin. 2015. *Modul Pendidikan Kewarganegaraan (Perspektif Paradigma, Multidimensional, Budaya Kewarganegaraan dan Prinsip Pembelajaran*. Yogyakarta: Prodi PKN
- Creswell, John W. 2010. *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (diterjemahkan oleh Achmad

- Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____ 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Sarimaya, 2008. *Sertifikasi Guru*, Jakarta: Yrama Widya
- Hamalik, Oemar. 2007. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nusa Media
- Muhibbin, Ahmad. 2016. *Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Isu-isu Kontroversial Di Media Massa Untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Mahasiswa Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Madani*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 26 No. 1 Juni 2016 hal 1-10.
- Samani, Muchlas. 2009. *Manajemen Sekolah Panduan Praktis Pengelolaan Sekolah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Samsuri. 2004. *Civic Virtues Dalam Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan Di Indonesia Era Orde Baru*. Jurnal CIVICS Vol. 1 No. 2 Desember 2004 hal 225-239.
- Samsuri. 2011. *Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi Di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Pendidikan Th. XXX No. 2 Juni 2011 hal 268-281.
- Setiawati, Wiwi. 2016. *Implementasi Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013*. Jurnal CIVICUS Vol. 20 No. 2 Desember 2016 hal. 69-79.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu
- Sugiyono, 2007. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Cet III*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, 1991. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sunarso. 2009. *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim*. Jurnal HUMANIKA Vol. 9 No. 1 Maret 2009 Hal 67-80.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Wahab, Aziz A dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: ALFABETA.
- Winataputra, Udin, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.